

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adiwijaya, dkk, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang .
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A., & Heryani, W. (2020). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- A Hatu, R. (2018). *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arliman, L. (2018). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* . Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asir, M. (2022). *Ekonomi Pertanian*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Deliyanto, B. (2019). *Pengenalan Lahan*.
- Djafar, F. (2024). *Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembaga dalam Perencanaan Pembangunan* . Jakarta: CV. Mega Press Nusantara.
- Herry, A. S. (2026). *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria dan Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*. Jakarta: PT Media Pustaka Indo.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram : Mataram University Press.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* . Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Ilmu Hukum)*. Stuttgart: K.F.Kochler.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Silahooy, C. (2025). *Degradasi dan Rehabilitasi Tanah*. Bandung: Widina Media Utama.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo .
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakart: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono . (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulaiman. (2025). *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Widina Media Utama.

- Suyanto, V. S., Tedjosaputro, L., & Masriani, Y. T. (2024). *Penguatan Pengaturan Proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan*. Jakarta: CV Lawwana.
- Widiatmaka, S. (2022). *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

**Artikel dalam Jurnal:**

- Akbar, M. F. (2017). Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 2(1), 150-166.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikas*, 03(01), 1-35.
- Alif, W. (2023). Sektor Pertanian Untuk Pertumbuhan Ekonomi Regional Lampung. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 781-790.
- Arsini, N. L., & Surata, I. G. (2020). Akibat Hukum dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Hukum*, 8(1), 1-20.
- Ayele, A. (2020). Dampak perluasan urbanisasi terhadap lahan pertanian di Ethiopia: Sebuah tinjauan. *Studi Lingkungan dan Sosial Ekonomi*, 8(4), 73-80.
- Budiman, M. A. (2018). Penanggulangan Hambatan Bagi Produktivitas Petani Arjasari Dimusim Kering (Kelompok Tani Kukupu, Di Desa Arjasari, Kec. Arjasari, Kab. Bandung). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1-5.
- Dantes, K. F. (2023). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 1-12.
- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-75.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 486-494.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. (2020). Legal Basis Analysis of Imposition of Land and Building Tax with Tax Object Selling Value. *ICLSSE: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education*, 195-322.
- Dantes, K. F., hadi, I. G., & Kusuma, P. R. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Bentuk Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Berskala Kecil Berbasis Keadilan di Kabupaten Buleleng. *Senari (Seminar Nasional Riset dan Inovasi)*, 9, 225-233.
- Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

- Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 870-888.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171-183.
- Hadi, I. G., & Dantes, K. F. (2021). Conflict Between Buleleng Government and Chandra Dwipa Company Concerning Construction of Green Spaces. *ICLSSE: roceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education*, 21-28.
- Hadi, I. G., & Dantes, K. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 266-279.
- Hadi, S., & Michael, T. (2017). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, 5(2), 383-400.
- Iqbal, M., & Sumaryanto. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 167-182.
- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1(1), 1-21.
- Juhadi. (2020). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurusan Geografi - FIS UNNES*, 11-24.
- Misa, D., Moniaga, I. L., & Lahamendu, V. (2018). Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Kecamatan Airmadidi. *Jurnal Spasial*, 5(2), 171-178.
- Natasya, A., Aprillia, D. A., & Agustina, S. (2022). Alih Fungsi Lahan dari Perkebunan Menjadi Lahan Perumahan Di. *Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 43-54.
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset dan Inovasi)*, 5(1), 1-14.
- Octavianti, D. Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa*, 1(1), 69-83.
- Pramudia, G. (2021). Kajian Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009). *Jurnal Hukum Pertanian*, 1(1), 1-6.
- Pasandaran, E. (2006). Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgrasi di Indonesia. *Jurnal Litbag Pertanian*, 25(4), 123-129
- Rahman, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 1020-1034.
- Ramadhan, L. P. (2025). Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup. *Journal of Administrative Law and Public Policy*, 3(1), 91-109.\

- Sianturi, dkk, A. F. (2025). Peran Hukum Agraria Dalam Menyelesaikan Persoalan Tanah Sengketa di Republik Indonesia. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(02), 1-17.
- Siregar, N. F. (2020). Efektivitas Hukum. *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 1-6.
- Sugiarto, A., & Ramadani, R. K. (2024). Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun). *Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun)*, 7(1), 618-626.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264-293.
- Widayati, W. (2015). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 5-11.
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121-134.

#### **Artikel dalam Elektronik:**

- Pemkab Buleleng. (2026). *Komitmen Pemkab Buleleng Jaga Ketahanan Pangan dengan Pemeliharaan Irigasi Pertanian*. Tersedia pada tautan: [https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/61\\_komitmen-pemkab-buleleng-jaga-ketahanan-pangan-dengan-pemeliharaan-irigasi-pertanian](https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/61_komitmen-pemkab-buleleng-jaga-ketahanan-pangan-dengan-pemeliharaan-irigasi-pertanian) (Diakses pada 19 Januari 2026).
- Sinar Timur. (2025). *Penentuan KP2B Buleleng Megaburan, Dewan Buat RTRW Fiktif?*. Tersedia pada tautan: [Sinartimur.co.id/penentuan-pk2b-buleleng-megaburan-dewan-buat-rtrw-fiktif/](https://sinartimur.co.id/penentuan-pk2b-buleleng-megaburan-dewan-buat-rtrw-fiktif/) (Diakses pada 6 Desember 2025)
- Dinas Bina Marga & Penetapan Ruang. (2025) *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan LBS, LSD, KP2B DAN LP2B*. Tersedia Pada tautan: <https://dbmpr.jabarprov.go.id/postingan/pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah-dan-lbs-lsd-kp2b-dan-lp2b-68b7edaae6e566815ad2990b>
- Tarubali. (2023). *Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) RTRWP Bali*. Tersedia Pada Tautan: <https://tarubali.baliprov.go.id/kawasan-pertanian-pangan-berkelanjutan-kp2b-dalam-rtrwp-bali/>
- Sekretariat DPRD. (2025). *Tanggapi Aduan Keberatan Warga Terkait Penetapan Status KP2B dan LSD, DPRD Buleleng Lakukan Peninjauan Kelapangan*. Tersedia Pada Tautan: [https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/19\\_tanggapi-aduan-keberatan-warga-terkait-penetapan-status-kp2b-dan-lsd-dprd-buleleng-lakukan-peninjauan-kelapangan](https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/19_tanggapi-aduan-keberatan-warga-terkait-penetapan-status-kp2b-dan-lsd-dprd-buleleng-lakukan-peninjauan-kelapangan)

### **Skripsi/Tesis:**

- Aziz, A.F. 2020. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Skripsi*. Universitas Islam (UI) : Malang.
- Ansari, N.M. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sinjai. *Tesis*. Universitas Hasanuddin: Makasar.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara No.104 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2004 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4.